

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu bangsa. Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tertinggi, memegang peran kunci dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Di Indonesia, peran perguruan tinggi swasta (PTS) sangat signifikan mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi PTS adalah Proses pengelolaan pendidikan.

Proses pengelolaan pendidikan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan PTS. Pengelolaan keuangan yang baik akan memastikan bahwa dana yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung berbagai aktivitas akademik dan non-akademik. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga akan membantu PTS dalam menyediakan fasilitas yang memadai, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Proses pengelolaan pendidikan yang Daya guna dan hasil guna sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan. PTS seringkali menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan sumber dana, alokasi anggaran, dan transparansi keuangan. Permasalahan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan serta kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Banyak perguruan tinggi swasta sangat bergantung pada biaya pendidikan (SPP) yang dibayar oleh mahasiswa sebagai sumber pendapatan utama. Fenomena ini menunjukkan bagaimana fluktuasi dalam jumlah mahasiswa yang mendaftar atau kemampuan mereka untuk membayar SPP dapat secara langsung mempengaruhi stabilitas keuangan institusi tersebut. Misalnya, selama pandemi COVID-19, banyak mahasiswa mengalami kesulitan keuangan, yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak

perguruan tinggi swasta. Keterbatasan sumber dana ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan. Keterbatasan dana ini mempengaruhi kemampuan perguruan tinggi untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, dan program akademik yang berkualitas.

Beberapa perguruan tinggi swasta di Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka. Fenomena ini seringkali terlihat dalam bentuk kurangnya pelaporan keuangan yang jelas dan terbuka kepada pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua, dan pihak pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, orang tua, dan masyarakat, dan menurunkan reputasi institusi tersebut.

Fenomena lain yang signifikan adalah hubungan antara pengelolaan keuangan yang buruk dengan kualitas pendidikan. Ketika dana tidak dikelola dengan baik, perguruan tinggi mungkin menghadapi kesulitan dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, memperbarui kurikulum, dan mempertahankan staf pengajar yang berkualitas. Hal ini pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa dan reputasi akademik perguruan tinggi tersebut.

Penyusunan anggaran di beberapa perguruan tinggi swasta masih dilakukan secara konvensional, tanpa mempertimbangkan analisis kebutuhan yang mendalam dan prioritas strategis. Banyak perguruan tinggi swasta mengalami ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran mereka. Misalnya, alokasi dana yang tidak proporsional antara kegiatan akademik dan non-akademik dapat menjadi masalah. Beberapa institusi mungkin mengalokasikan lebih banyak dana untuk kegiatan yang kurang esensial sementara kegiatan akademik yang vital mendapatkan porsi yang lebih sedikit. Fenomena ini menunjukkan perlunya perencanaan dan penganggaran yang lebih baik untuk memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif.

Pengawasan dan pengendalian internal yang lemah adalah fenomena umum di banyak perguruan tinggi swasta. Banyak institusi tidak memiliki

sistem yang efektif untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan dana atau ketidakefisienan. Misalnya, kurangnya audit internal yang teratur atau mekanisme pengawasan yang memadai dapat memungkinkan terjadinya praktik korupsi atau penggunaan dana yang tidak sesuai.

Beberapa perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelaporan keuangan yang kurang baik dapat menghambat proses evaluasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Kurangnya evaluasi yang sistematis terhadap kinerja keuangan dan penyesuaian anggaran berdasarkan hasil evaluasi sering kali menghambat perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan. Tanpa evaluasi yang memadai, institusi sulit untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Banyak perguruan tinggi swasta belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam pengelolaan keuangan mereka. Teknologi dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Namun, fenomena yang sering terjadi adalah kurangnya investasi dalam sistem teknologi informasi atau kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan teknologi tersebut, yang menghambat kemampuan institusi untuk mengelola keuangan secara efektif.

Regulasi dan kebijakan yang tidak konsisten atau tidak jelas juga merupakan fenomena yang mempengaruhi manajemen pembiayaan di perguruan tinggi swasta. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi pendidikan atau aturan akuntansi dapat mempengaruhi bagaimana perguruan tinggi mengelola dan melaporkan keuangan mereka. Ketidakpastian regulasi ini dapat menyebabkan perguruan tinggi kesulitan dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka secara jangka panjang.

Beberapa perguruan tinggi swasta mungkin belum sepenuhnya mematuhi regulasi dan standar akuntansi yang berlaku, baik dari sisi pelaporan

keuangan maupun pengelolaan dana. Kepatuhan yang rendah terhadap regulasi dan standar dapat berisiko pada sanksi dari otoritas terkait dan menurunkan reputasi institusi.

Manajemen risiko keuangan yang belum diterapkan secara menyeluruh di beberapa perguruan tinggi swasta dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi krisis keuangan. Implementasi manajemen risiko yang efektif dapat membantu perguruan tinggi swasta untuk lebih siap dalam menghadapi ketidakpastian dan menjaga stabilitas keuangan.

Faktor eksternal seperti perubahan ekonomi, perubahan demografi mahasiswa, dan persaingan dengan institusi lain juga mempengaruhi stabilitas keuangan perguruan tinggi swasta. Misalnya, jika terjadi resesi ekonomi, orang tua mungkin kesulitan membayar biaya pendidikan anak-anak mereka, yang akan mempengaruhi pendapatan perguruan tinggi. Fenomena ini menunjukkan pentingnya perguruan tinggi untuk memiliki strategi keuangan yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan eksternal.

Pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di perguruan tinggi swasta merupakan elemen penting dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas pendidikan yang ditawarkan. Untuk mencapai hal ini, berbagai peraturan dan kebijakan telah diterapkan baik dari pemerintah maupun kebijakan internal institusi. Berikut adalah beberapa peraturan dan kebijakan terkait dengan tata kelola keuangan perguruan tinggi swasta di Indonesia:

- a. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.** Mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, termasuk aspek keuangan dan pengelolaan perguruan tinggi swasta.
- b. **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.** Menjelaskan mengenai tata kelola dan pengelolaan keuangan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
- c. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.** Mengatur mengenai sistem pendidikan nasional yang mencakup perguruan tinggi, termasuk aspek pendanaan dan pengelolaan keuangan.

- d. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.** Menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, termasuk standar pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.
- e. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.** Mengatur mengenai akreditasi program studi dan perguruan tinggi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan.
- f. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.** Mengganti Permendikbud Nomor 44 Tahun 2015 dan mengatur lebih lanjut tentang standar nasional pendidikan tinggi, termasuk pengelolaan keuangan.
- g. **Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.** Menetapkan ketentuan mengenai akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan.
- h. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).** Standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk memastikan laporan keuangan perguruan tinggi swasta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- i. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).** Meskipun lebih relevan untuk institusi keuangan, perguruan tinggi swasta yang memiliki unit bisnis yang bergerak di sektor keuangan mungkin perlu mematuhi peraturan OJK.
- j. **Pedoman dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.** Setiap perguruan tinggi swasta biasanya memiliki pedoman dan prosedur internal terkait pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. **Sistem Pengendalian Internal.** Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- l. **Peraturan Menteri Keuangan.** Peraturan yang mengatur mengenai

pengelolaan dana hibah, beasiswa, dan bantuan keuangan lainnya yang diterima perguruan tinggi swasta dari pemerintah atau pihak ketiga.

m. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Menetapkan standar dan kriteria akreditasi yang mencakup aspek pengelolaan keuangan perguruan tinggi swasta.

Mematuhi peraturan dan kebijakan ini adalah penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel di perguruan tinggi swasta, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kepercayaan pemangku kepentingan.

Dengan adanya berbagai peraturan dan kebijakan ini, diharapkan perguruan tinggi swasta dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang mereka tawarkan. Regulasi ini juga membantu memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara efisien dan efektif, serta mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana.

Akuntabilitas tatakelola keuangan merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan benar dan tepat sasaran. Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang transparan, tetapi juga perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Perguruan tinggi yang memiliki sistem manajemen pembiayaan yang akuntabel akan lebih dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan mampu mencapai tujuan pendidikan dengan lebih efektif. Perguruan tinggi yang memiliki sistem manajemen pembiayaan yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi operasional, menyediakan fasilitas yang memadai, serta mendukung program-program akademik dan non-akademik yang berkualitas.

Akuntabilitas tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta terdiri dari seperangkat aturan, praktik, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan transparansi, kebenaran, dan integritas dalam pengelolaan keuangan institusi. Perguruan tinggi swasta dengan tata kelola keuangan yang efektif dapat menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien, mengelola

sumber daya keuangan secara bijaksana, dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Beberapa karakteristik penting dari Akuntabilitas tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pedoman: perguruan tinggi swasta harus memiliki kebijakan dan pedoman yang jelas mengenai manajemen pembiayaan. Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran dana, manajemen aset, dan pelaporan keuangan. Kebijakan-kebijakan ini harus disusun dengan mempertimbangkan standar akuntansi yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengelolaan dana: pengelolaan dana harus dilakukan secara cermat dan akurat. PTS harus memiliki sistem pencatatan keuangan yang handal untuk melacak setiap penerimaan dan pengeluaran dana. Setiap transaksi harus didokumentasikan dengan jelas dan dievaluasi secara teratur.
3. Transparansi dan publikasi informasi: perguruan tinggi swasta harus memastikan transparansi informasi keuangan. Data keuangan, termasuk laporan keuangan, anggaran, dan catatan lainnya, harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, orang tua, dan masyarakat umum.
4. Pemantauan dan audit internal: sistem pengawasan dan audit internal harus diterapkan untuk memverifikasi bahwa kebijakan dan prosedur keuangan telah diikuti. Jika ditemukan kesalahan atau kemungkinan bahaya, tim audit internal dapat melakukan audit secara berkala terhadap sistem keuangan dan memberikan rekomendasi untuk perubahan.
5. Akuntabilitas: siapapun atau organisasi yang terlibat dalam manajemen pembiayaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga, struktur tanggung jawab yang jelas harus dikembangkan.
6. Penyusunan laporan keuangan: laporan keuangan harus dipersiapkan dengan teliti dan tepat. Laporan-laporan ini harus memberikan informasi

yang rinci mengenai situasi keuangan lembaga, seperti aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran. Laporan keuangan harus mengikuti aturan akuntansi yang tepat dan dapat dibaca dan jelas.

7. Pelatihan dan pengembangan: karyawan manajemen pembiayaan di lembaga-lembaga swasta harus menerima pelatihan dan pengembangan. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka memahami proses akuntansi dan peraturan keuangan dengan lebih baik, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan dana.

Perguruan tinggi swasta dapat mencapai keberlanjutan keuangan, menciptakan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, dan meningkatkan reputasi mereka sebagai lembaga pendidikan yang profesional dan bertanggung jawab secara finansial dengan menerapkan Akuntabilitas tatakelola keuangan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 43 perguruan tinggi harus memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai pada satuan program studi, melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari pembuatan rencana kerja dan anggaran tahunan, dan menilai sejauh mana standar satuan biaya pendidikan tinggi telah dipenuhi pada setiap akhir tahun anggaran. Sementara menurut pasal 44, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, Badan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa dan perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

Beberapa temuan hasil studi pendahuluan terkait Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta, menunjukkan bahwa :

1. Integrasi perencanaan keuangan yang tidak memadai: perguruan tinggi swasta sering kali kesulitan untuk mengintegrasikan perencanaan keuangan

dengan perencanaan strategis dan akademis. Hal ini dapat menyebabkan rencana keuangan jangka panjang dan tujuan pendidikan tidak sinkron.

2. Perencanaan anggaran yang mendalam: perguruan tinggi swasta tertentu memiliki perencanaan anggaran yang tidak mendalam dengan proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang salah atau berlebihan. Kekurangan dana atau pengeluaran yang tidak terkendali dapat diakibatkan oleh kurangnya pemahaman yang mendalam tentang sumber daya yang dibutuhkan.
3. Kurangnya partisipasi aktif dan keterlibatan berbagai pihak terkait; termasuk manajemen perguruan tinggi, fakultas, dan staf administrasi, agar berhasil menerapkan manajemen pembiayaan dalam proses perencanaan
4. Kurangnya keahlian akuntansi: universitas swasta kesulitan menemukan karyawan yang memiliki keahlian akuntansi yang diperlukan. Hal ini dapat menyulitkan dalam hal pencatatan yang benar, menyediakan laporan keuangan yang tepat waktu, atau menggunakan standar akuntansi yang tepat.
5. Ketidaktepatan dan ketidakakuratan data keuangan: Laporan keuangan salah atau terlambat dirilis sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat saat mencatat transaksi keuangan atau kurangnya pemahaman tentang konsep akuntansi.
6. Keterbatasan sistem informasi keuangan: sistem informasi keuangan yang digunakan oleh beberapa universitas swasta memiliki beberapa batasan. Hal ini dapat mempersulit mereka untuk melacak dan mengelola data keuangan secara efektif, yang akan mempersulit pelaporan keuangan yang akurat serta analisis dan pengambilan keputusan yang bijaksana.
7. Pengendalian internal yang tidak efektif: sistem pengendalian internal perguruan tinggi swasta rentan terhadap kelemahan. Hal ini dapat meningkatkan risiko penipuan keuangan, pelaporan keuangan yang tidak akurat, atau manajemen aset yang buruk.
8. Rendahnya frekuensi dan kualitas audit eksternal: perguruan tinggi swasta tidak melakukan audit eksternal yang memadai secara berkala. Hal ini dapat mempersulit identifikasi pelanggaran, kesalahan, atau perilaku tidak etis

tatakelola keuangan.

Gambaran terhadap pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi swasta di Indonesia menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi dalam sistem administrasi dan akuntansi keuangan, sehingga sulit untuk mempertanggungjawabkan seluruh transaksi yayasan dan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Keterbukaan informasi pengelolaan dana perguruan tinggi swasta masih menjadi masalah yang terus berlanjut tanpa solusi yang jelas. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, terutama transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, terkait dengan masalah pengelolaan keuangan. Mahasiswa, di sisi lain, terus merongrong dengan berbagai cara agar tuntutan mereka dipenuhi. Persoalan ini tak kunjung usai, terbukti dengan adanya keinginan manajemen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk tidak jujur dan terbuka kepada mahasiswa terkait pengelolaan pendapatan kampus.(Ariani, 2017)

Dalam konteks ini, penelitian tentang Proses pengelolaan pendidikan dan Akuntabilitas tatakelola keuangan di perguruan tinggi swasta menjadi relevan. Hal ini akan membantu mengatasi masalah yang dihadapi perguruan tinggi swasta dalam mengelola operasi mereka, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menjaga kelangsungan hidup keuangan institusi. Selain itu, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai relevansi transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam mempertahankan keberlanjutan dan kemajuan perguruan tinggi swasta di Indonesia dalam konteks pembangunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Proses pengelolaan pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman kita tentang isu-isu terkait. Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Mulyono (2018), Rahayu dan Sulisty (2019), Nurdin dan Zuhdi (2020), serta Amaliah et al. (2021), telah mengkaji berbagai aspek Proses pengelolaan pendidikan, mulai dari transparansi, akuntabilitas, strategi pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Namun, meskipun

demikian, masih terdapat beberapa celah pengetahuan yang perlu diisi.

Salah satu celah yang menonjol adalah kurangnya fokus pada perguruan tinggi swasta berbasis Islam. Studi-studi sebelumnya cenderung lebih banyak mengkaji institusi negeri atau perguruan tinggi swasta secara umum. Padahal, perguruan tinggi swasta berbasis Islam memiliki karakteristik unik yang perlu diperhatikan, seperti nilai-nilai keagamaan yang mengintegrasikan aspek spiritualitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi integrasi antara strategi Proses pengelolaan dengan upaya peningkatan mutu tata kelola keuangan secara holistik.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga belum secara khusus membahas peran teknologi informasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi Islam. Meskipun beberapa studi telah menyoroti pentingnya teknologi informasi, namun masih terbatas pada studi kasus umum dan belum mencakup tantangan unik yang dihadapi oleh institusi pendidikan tinggi Islam dalam mengimplementasikan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Bandung.

Universitas Islam Bandung merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di wilayah LLDIKTI IV yang telah melaksanakan Proses pengelolaan pendidikan dengan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi. Lebih lanjut bahwa lokus (Universitas Islam Bandung) tersebut dinilai layak digunakan dalam sebuah penelitian, dikarenakan memiliki karakteristik, relevansi, dan keterkaitan atau hubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Pemilihan Universitas Islam Bandung (UNISBA) sebagai lokasi penelitian dalam disertasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. Berikut adalah alasan pemilihan tempat atau locus penelitian secara detail:

1. Relevansi dengan tujuan penelitian

UNISBA merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki visi dan misi yang kuat dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan mereka. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan meningkatkan Proses pengelolaan pendidikan guna mencapai Akuntabilitas tatakelola keuangan, dan kedua universitas ini telah menunjukkan komitmen dalam hal tersebut.

2. Implementasi teknologi informasi

Universitas ini telah mulai mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan mereka. Sistem Informasi Anggaran Unisba (SIARAN) adalah aplikasi yang bertujuan untuk membuat pengajuan anggaran seperti kegiatan, perawatan, dan pengadaan barang (supplies). Ini sejalan dengan salah satu fokus penelitian, yaitu peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung Proses pengelolaan yang akuntabel.

3. Ketersediaan data dan aksesibilitas

UNISBA memiliki sistem pengelolaan data yang cukup baik, yang memungkinkan peneliti untuk mengakses data keuangan dan informasi yang relevan dengan relatif mudah. Ketersediaan data yang lengkap dan dapat diandalkan sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian

4. Komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi

Universitas ini telah menunjukkan upaya yang serius dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan mereka. Ini tercermin dalam kebijakan dan praktik yang mereka terapkan, seperti audit internal dan eksternal, serta publikasi laporan keuangan. Komitmen ini membuat UNISBA menjadi subjek yang ideal untuk mengkaji bagaimana Proses pengelolaan pendidikan dapat ditingkatkan lebih lanjut.

5. Kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan

Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNISBA selalu berusaha meningkatkan

kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Manajemen pembiayaan yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan ini. Dengan fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu kedua universitas ini meningkatkan mutu tata kelola keuangan mereka.

6. Dukungan dari pihak universitas

Universitas telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan penelitian ini. Dukungan ini mencakup penyediaan akses ke data dan informasi, partisipasi aktif dari staf dan pengelola keuangan, serta fasilitasi dalam pengumpulan data. Dengan adanya dukungan ini, penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih Daya guna dan hasil guna.

7. Potensi generalisasi penelitian

Meskipun fokus pada satu universitas tertentu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digeneralisasi dan diadaptasi oleh institusi pendidikan tinggi swasta lainnya di Indonesia. Situasi dan tantangan yang dihadapi oleh UNISBA dalam Proses pengelolaan pendidikan kemungkinan besar juga dialami oleh institusi lainnya, sehingga temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, pemilihan Universitas Islam Bandung sebagai locus penelitian sangatlah tepat dan strategis. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan mendalam mengenai Proses pengelolaan pendidikan di kedua universitas tersebut, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan praktik tata kelola keuangan di perguruan tinggi swasta lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Proses pengelolaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan**, dengan studi kasus dilakukan di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi Proses pengelolaan pendidikan di PTS dalam rangka meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan. Fokus penelitian ini

adalah mengidentifikasi praktik terbaik, tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem manajemen pembiayaan di PTS.

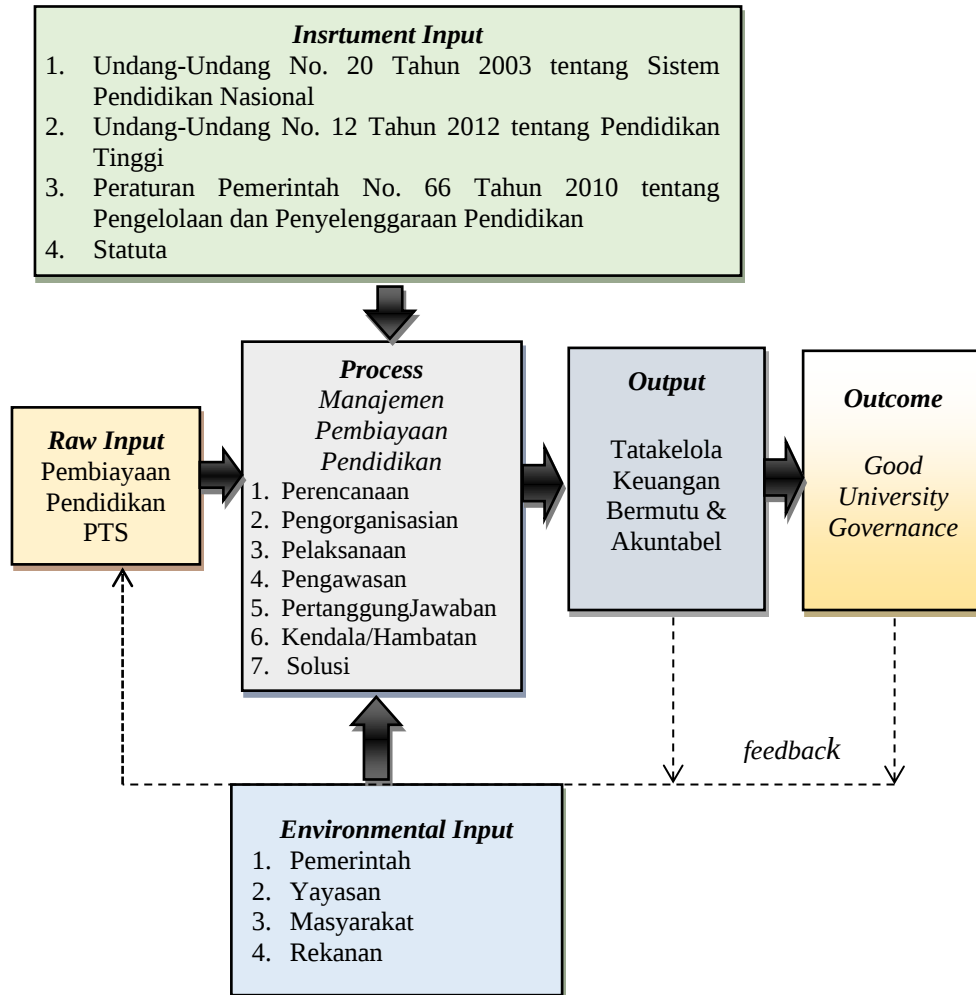
B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan kajian literatur, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perguruan tinggi swasta dalam mengelola keuangan secara Daya guna dan hasil guna. Tantangan tersebut antara lain kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengendalian internal, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam praktik-praktik Proses pengelolaan yang telah dilakukan di Universitas Islam Bandung, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian adalah Universitas Islam Bandung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan, seperti bendahara umum, kepala unit, dan dosen. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, kebijakan keuangan, dan prosedur operasional standar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka perumusan masalah ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 1 Bagan Perumusan Masalah

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas, bahwa upaya Proses pengelolaan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan dipengaruhi berbagai faktor, yaitu :

a. Raw Input

Raw input atau komponen masukan, yakni pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi swasta. Segala kegiatan yang dilakukan perguruan tinggi memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Aspek pembiayaan ini perlu dikelola seefektif mungkin karena pada umumnya dunia pendidikan selalu berhadapan dengan tantangan

dana yang terbatas. Dana yang ada harus digunakan secara optimal untuk membantu pencapaian tujuan kegiatan perguruan tinggi.

b. Proses

Komponen proses merupakan suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam Proses pengelolaan pendidikan. Proses Proses pengelolaan pendidikan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan peertanggungjawaban serta ditambahkan dengan masalah/kendala dan solusinya.

c. *Instrumental Input*

Komponen masukan dari dukungan internal untuk mendukung tercapainya pelaksanaan Proses pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. *Instrumental input* dalam Proses pengelolaan pendidikan ini meliputi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Statuta.

d. *Enviromental Output*

Proses Proses pengelolaan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang mempengaruhi proses tersebut, yaitu Pemerintah, Yayasan, Masyarakat dan Rekanan.

e. *Output*

Hasil keluaran dari proses Proses pengelolaan pendidikan, diharapkan menghasilkan Tatakelola Keuangan Bermutu & Akuntabel. Proses pengelolaan pendidikan merupakan elemen yang sangat penting dan strategis dalam manajemen perguruan tinggi untuk merealisasikan visi, misi, dan tujuan lembaga secara keseluruhan.

f. *Outcome*

Dampak (*impact*) dari Proses pengelolaan pendidikan adalah menghasilkan *good university governance*. Untuk mewujudkan PTS yang bermutu, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan

profesional terhadap sumber daya yang ada dalam Perguruan Tinggi, salah satunya adalah sumber daya keuangan.

g. *Feedback*

Feedbacak dari Proses pengelolaan pendidikan adalah menghasilkan *good university governance*. Untuk mewujudkan PTS yang bermutu, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya *Feedback* dari Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tata kelola keuangan mencakup transparansi dalam perencanaan anggaran, efektivitas alokasi dan penggunaan dana, serta pelaporan yang akuntabel dan tepat waktu.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat masalah yang dirumuskan cukup luas, maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan, meliputi :

- a. Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan, indikatornya meliputi:
 - 1) Penetapan anggaran: bagaimana proses penentuan dan alokasi anggaran dilakukan, termasuk metode estimasi biaya dan sumber pendanaan.
 - 2) Keterlibatan stakeholder: partisipasi pihak-pihak terkait (seperti pimpinan universitas, fakultas, departemen, dan unit terkait) dalam proses perencanaan pembiayaan.
 - 3) Kesesuaian dengan visi dan misi: bagaimana perencanaan anggaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis universitas.
 - 4) Kebijakan keuangan: implementasi kebijakan internal terkait perencanaan keuangan, termasuk prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - 5) Prediksi pendapatan dan pengeluaran: metode yang digunakan untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran dalam jangka pendek dan panjang.

b. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan yang akuntabel, indikatornya meliputi :

- 1) Struktur organisasi: bagaimana struktur organisasi diatur untuk mengelola pembiayaan, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab di antara berbagai unit.
- 2) Koordinasi antar unit: proses koordinasi antara unit-unit yang terlibat dalam Proses pengelolaan, seperti keuangan, akademik, dan administrasi.
- 3) Kapasitas sumber daya: ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan.
- 4) Penerapan teknologi: penggunaan teknologi informasi dan sistem manajemen pembiayaan dalam pengorganisasian.
- 5) Peraturan internal: peraturan dan prosedur internal yang mengatur pengorganisasian pembiayaan, termasuk kebijakan penugasan dan evaluasi kinerja.

c. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan, indikatornya meliputi:

- 1) Realisasi anggaran: sejauh mana anggaran yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan rencana, termasuk analisis penyimpangan.
- 2) Pengelolaan dana: efektivitas pengelolaan dana, termasuk penerimaan, penggunaan, dan pelaporan keuangan.
- 3) Prosedur pengeluaran: kepatuhan terhadap prosedur pengeluaran dana, termasuk transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- 4) Monitoring dan evaluasi: proses monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan anggaran, termasuk mekanisme untuk penyesuaian dan koreksi.
- 5) Pelaporan keuangan: ketepatan waktu dan akurasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait.

- d. Pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan, indikatornya meliputi:
 - 1) Audit internal: pelaksanaan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan.
 - 2) Sistem pengendalian internal: keberadaan dan efektivitas sistem pengendalian internal yang meminimalkan risiko keuangan.
 - 3) Pemantauan kinerja: proses pemantauan kinerja keuangan dan operasional, termasuk analisis risiko dan tindak lanjut.
 - 4) Kepatuhan terhadap regulasi: sejauh mana manajemen pembiayaan mematuhi regulasi eksternal dan internal.
 - 5) Pelaporan pengawasan: pelaporan hasil pengawasan dan tindakan korektif yang diambil berdasarkan temuan.
- e. Pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan, indikatornya meliputi:
 - 1) Laporan keuangan: kualitas dan ketepatan waktu laporan keuangan yang disajikan kepada stakeholder internal dan eksternal.
 - 2) Akuntabilitas publik: sejauh mana universitas bertanggung jawab secara publik terkait penggunaan dana, termasuk transparansi dalam pelaporan.
 - 3) Penilaian kinerja: evaluasi kinerja keuangan berdasarkan indikator kinerja utama, seperti efisiensi, efektivitas, dan ekonomi.
 - 4) *Feedback* dari *stakeholder*: proses mendapatkan dan menindaklanjuti *feedback* dari stakeholder terkait pertanggungjawaban keuangan.
 - 5) Tindak lanjut audit: pelaksanaan dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil audit internal dan eksternal.
- f. Masalah/hambatan mencakup masalah/hambatan dalam Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan, meliputi:
 - 1) Ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran
 - 2) Keterbatasan dalam pengorganisasian keuangan

- 3) Hambatan dalam pelaksanaan anggaran
- 4) Kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian keuangan
- 5) Kesulitan dalam pertanggungjawaban keuangan
- g. Solusi: mencakup semua solusi dalam mengatasi masalah/hambatan dalam Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu akuntabilitas tatakelola keuangan, meliputi solusi:
 - 1) Peningkatan akurasi dalam perencanaan anggaran
 - 2) Penguatan struktur pengorganisasian keuangan
 - 3) Optimalisasi pelaksanaan anggaran
 - 4) Penguatan pengawasan dan pengendalian keuangan
 - 5) Peningkatan pertanggungjawaban keuangan

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Proses pengelolaan pendidikan di Universitas Islam Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam Proses pengelolaan pendidikan dapat diterapkan secara efektif untuk meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dan merumuskan solusi yang inovatif dalam mengelola keuangan di perguruan tinggi tersebut.

b. Tujuan khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

- 1) Perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.

- 2) Pengorganisasian pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.
- 3) Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.
- 4) Pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.
- 5) Pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.
- 6) Masalah/Kendala Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.
- 7) Solusi Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan pada Perguruan Tinggi Swasta Universitas Islam Bandung.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat teoritis yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian akademis dalam bidang manajemen pendidikan dan keuangan, khususnya di perguruan tinggi swasta. Berikut adalah manfaat teoritis dari penelitian ini:

- 1) Pengembangan Teori Proses pengelolaan Pendidikan:

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dalam Proses pengelolaan pendidikan dengan menyediakan data empiris yang mendalam mengenai bagaimana proses Proses pengelolaan diterapkan di perguruan tinggi swasta. Temuan penelitian ini dapat memperkaya konsep dan kerangka kerja teoritis yang berkaitan

dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.

2) Kontribusi pada Teori Akuntabilitas tatakelola keuangan:

Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori akuntabilitas tatakelola keuangan di sektor pendidikan tinggi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan strategi-strategi yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas, penelitian ini dapat menawarkan perspektif baru dan memperdalam pemahaman tentang akuntabilitas dalam konteks manajemen pembiayaan pendidikan.

3) Penyediaan Model Konseptual Berbasis Konteks Lokal:

Salah satu kontribusi teoritis penting dari penelitian ini adalah pengembangan model konseptual Proses pengelolaan pendidikan yang berbasis pada konteks lokal di perguruan tinggi swasta Indonesia. Model ini dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya dan dapat disesuaikan untuk diterapkan di konteks lain yang serupa.

4) Peningkatan Pemahaman Tentang Kompleksitas Manajemen pembiayaan di Perguruan Tinggi Swasta:

Penelitian ini memberikan wawasan teoritis yang lebih mendalam tentang kompleksitas manajemen pembiayaan di perguruan tinggi swasta, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi dan pendekatan-pendekatan yang efektif untuk mengatasinya. Ini akan membantu memperkuat literatur yang ada dengan menambahkan bukti-bukti empiris dari konteks spesifik.

5) Dasar untuk Pengembangan Penelitian Lanjutan:

Hasil dan temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih jauh berbagai aspek Proses pengelolaan pendidikan dan tata kelola keuangan. Penelitian ini juga dapat membuka ruang bagi kajian

komparatif antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri atau antara perguruan tinggi di Indonesia dengan negara lain.

Secara keseluruhan, manfaat teoritis dari penelitian ini berkontribusi pada pengayaan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen pendidikan dan keuangan, serta memberikan dasar teoritis yang kuat untuk pengembangan praktik-praktik manajemen yang lebih efektif dan akuntabel di perguruan tinggi swasta.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki sejumlah manfaat praktis yang dapat langsung diaplikasikan oleh berbagai pihak terkait. Berikut adalah manfaat praktis dari penelitian ini dan siapa saja yang akan mendapatkan manfaat tersebut:

1) Bagi Manajemen Perguruan Tinggi (Universitas Islam)

- a) Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Penelitian ini memberikan panduan praktis bagi manajemen perguruan tinggi dalam menyusun dan menerapkan strategi Proses pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Dengan memahami praktik terbaik yang diungkapkan dalam penelitian ini, manajemen dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya keuangan dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- b) Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas: Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu perguruan tinggi dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan. Ini akan memastikan bahwa dana yang dikelola digunakan secara transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan tujuan institusi.
- c) Meningkatkan Kualitas Perencanaan Keuangan: Penelitian ini memberikan panduan yang jelas dalam proses perencanaan keuangan, membantu universitas dalam menyusun anggaran

yang realistis dan terukur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas keuangan institusi.

2) Bagi Staf dan Fakultas Perguruan Tinggi

- a) Peningkatan Keterlibatan dalam Proses Keuangan: Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi staf dan fakultas dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan. Dengan partisipasi yang lebih besar, staf dan fakultas dapat berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih baik dan merasa lebih memiliki atas keputusan-keputusan keuangan yang diambil.
- b) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelatihan untuk staf dan fakultas agar lebih memahami proses manajemen pembiayaan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini akan meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dan mengawasi keuangan institusi.

3) Bagi Pihak Eksternal (Pemangku Kepentingan dan Pemerintah)

- a) Panduan untuk Kebijakan dan Regulasi: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung manajemen pembiayaan yang akuntabel di perguruan tinggi swasta. Ini bisa mencakup panduan dalam penyusunan standar nasional untuk tata kelola keuangan di sektor pendidikan.
- b) Evaluasi dan Pengawasan Lebih Efektif: Penelitian ini memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh pihak eksternal, seperti badan akreditasi dan auditor, untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja keuangan perguruan tinggi secara lebih efektif.

4) Bagi Mahasiswa dan Orang Tua

- a) **Transparansi dan Akuntabilitas yang Lebih Baik:** Dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, mahasiswa dan orang tua akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap perguruan tinggi. Mereka akan lebih yakin bahwa biaya pendidikan yang mereka bayarkan digunakan dengan tepat dan efisien.
 - b) **Stabilitas Biaya Pendidikan:** Dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, perguruan tinggi dapat menjaga stabilitas biaya pendidikan, yang bermanfaat bagi mahasiswa dan orang tua dalam perencanaan keuangan mereka.
- 5) Bagi peneliti selanjutnya
- a) Penelitian ini bisa memberikan landasan empiris dan data komprehensif terkait strategi efektif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
 - b) Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran di institusi pendidikan.
 - c) Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong pengaplikasian teknologi digital dalam pengelolaan keuangan.
 - d) Temuan ini juga dapat digunakan untuk membandingkan praktik Proses pengelolaan di berbagai institusi lain, baik nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, manfaat praktis dari penelitian ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas tata kelola keuangan di perguruan tinggi swasta, dengan dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak terkait, dari manajemen internal hingga pemangku kepentingan eksternal.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana perencanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
2. Bagaimana pengorganisasian pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
3. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
4. Bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu Akuntabilitas tatakelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
6. Apa Masalah/hambatan yang dihadapi pada Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan di Universitas Islam Bandung?
7. Bagaimana Solusi hambatan Proses pengelolaan pendidikan dalam meningkatkan mutu tata kelola keuangan di Universitas Islam Bandung?